

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika

Charles Reith, 1984 dalam Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, Jakarta: PTIK

Henry S. Siswosoediro, 2008, *Buku Pintar Perizinan dan Dokumen*, Jakarta: Transmedia

Khayatudin, 2012, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, Kediri: PT. Uniska Press

Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara

Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia

Prayudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Ridwan. HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan. HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum kepolisian*, Yogyakarta: PT. LaksBang Persindo

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: PT Grasindo

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keppres Nomor 97 Tahun 2001 Tanggal 2 Agustus 2001, Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Juklap Kapolri No. Pol./02/XII/1995 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

C. Sumber Lainnya

Febyanti Putri, *“Pelaksanaan Pemberian Izin Keramaian oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014

